

Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga

Ina Siah*, Noor Miyono

Manajemen Pendidikan, Universitas PGRI Semarang
Jl. Sidodadi Timur No. 24 – Dr. Cipto, Semarang

*Email: isna.sucipto@gmail.com

Abstrak

Paradigma baru pendidikan dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Konsep desentralisasi dalam pendidikan berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membuat keputusan manajemen dan menyusun perencanaan sendiri dalam mengatasi masalah pendidikan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional. Pemberian otonomi penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif. Dalam kerangka inilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menjadi salah satu kebijakan manajemen pendidikan yang ditawarkan pada paradigma baru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prinsip-prinsip dan implementasi fungsi manajemen berbasis sekolah (MBS) di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, tim pengembang kurikulum, petugas inventaris, dan bendahara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskripsi meliputi tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Uji Keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) UPTD SPNF SKB Kota Salatiga telah mengimplementasikan prinsip manajemen berbasis sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal. (2) UPTD SPNF SKB Kota Salatiga mengimplementasi fungsi manajemen berbasis sekolah pada manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, dan manajemen budaya dan lingkungan.

Kata Kunci: implementasi, manajemen berbasis sekolah

Abstract

The new education paradigm in the National Education System Law Number 20 of 2003 is the embodiment of one of the reform demands for changing the government system from centralization to decentralization. The concept of decentralization in education means the delegation of authority from the central government to regional governments to make management decisions and prepare their own plans to overcome educational problems by referring to the national education system. Providing autonomy for the implementation of education in schools in order to improve the quality of education requires a more conducive management approach so that it can accommodate all desires while empowering various components of society effectively. It is within this framework that School Based Management (SBM) becomes one of the educational management policies offered in the new paradigm. The aim of this research is to determine the principles and implementation of school-based management (MBS) functions in UPTD SPNF SKB Salatiga City. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The informants in this research were the school principal, curriculum development team, inventory officer, and treasurer. The data analysis technique using descriptive analysis includes three main things, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. Test the validity of the data using triangulation. The results of this research can be concluded that (1) UPTD SPNF SKB Salatiga City

has implemented school-based management principles in the implementation of non-formal education. (2) UPTD SPNF SKB Salatiga City implements school-based management functions in curriculum management, student management, educator and education staff management, facilities and infrastructure management, financing management, school and community relations management, and cultural and environmental management.

Keywords: *implementation, school-based management*

PENDAHULUAN

Paradigma baru pendidikan dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-undang tersebut salah satu diantaranya adalah desentralisasi pendidikan. Kebijakan desentralisasi pada paradigma baru di bidang pendidikan membawa konsekuensi adanya sejumlah wewenang yang semula dimiliki oleh pusat berpindah menjadi kewenangan daerah. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi ditandai dengan berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring dengan berjalanya otonomi daerah dengan disahkannya Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, kesadaran perlunya memperbaiki mutu penyelenggaraan di Indonesia melalui penerapan otonomi pendidikan membuat pemerintah berupaya mendesentralisasikan kewenangan penyelenggaraan pendidikan ke pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Pemerintah menuangkan upaya perbaikan mutu pelayanan pendidikan dengan menyusun Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut memberikan penekanan yang lebih tegas tentang peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Pada pasal 11 dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Mufidayati, 2017: 1).

Desentralisasi dalam pendidikan berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membuat keputusan manajemen dan menyusun perencanaan sendiri dalam mengatasi masalah pendidikan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional. Dengan kata lain, dapat disimpulkan dengan sistem desentralisasi, sekolah memiliki otonomi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Otonomi pendidikan merupakan bentuk implikasi kebijakan otonomi daerah di bidang pendidikan. Hoessein (1993: 64) berdasarkan kajiannya terhadap kepustakaan Belanda berkesimpulan bahwa otonomi bukan hanya sebatas wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri tetapi juga termasuk penggunaan wewenang itu secara mandiri dan tetap di bawah pengawasan pemerintah pusat. Lebih lanjut Husein mengatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah pada prinsipnya untuk mendidik orang agar memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu nilai kebebasan pengambilan keputusan dan nilai demokrasi. Sehingga otonomi daerah mampu mendorong terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat.

Baedhowi menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan layanan publik yang sangat penting dalam pembangunan bangsa sehingga perhatian dan tuntutan masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat agar memberlakukan otonomi pendidikan semakin meningkat. Lebih lanjut Baedhowi dari hasil kajiannya tentang implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan menjelaskan tentang kondisi sebelum dan sesudah otonomi pendidikan. Sebelum otonomi pendidikan di daerah diberlakukan sebagian besar kewenangan mengurus berbagai permasalahan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hasilnya telah terbukti kurang efektif dan kurang efisien mengingat beban dan tanggung jawab yang jelas tidak mungkin dipertahankan oleh pemerintah. Banyak sekolah yang tidak terurus terutama di daerah marjinal tidak mendapatkan suplai sarana dan prasarana pembelajaran yang diperlukan dan juga tidak jarang sekolah di daerah yang kurang mendapatkan sentuhan pembinaan untuk meningkatkan profesionalisme guru maupun peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Otonomi di bidang pendidikan menunjukkan penggunaan wewenang tidak berhenti pada daerah tingkat kabupaten/ kota tetapi sampai ke tingkat sekolah sebagai ujung tombak

penyelenggaraan pendidikan. Titik berat penyerahan wewenang penyelenggaraan pendidikan dalam rangka otonomi pendidikan diberikan kepada sekolah. Dalam hal ini diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengukur dan mengurus sekolahnya sendiri atas prakarsa sekolah serta pengambilan keputusan partisipatif dalam rangka mencapai tujuan sekolah yaitu mencapai hasil belajar yang baik dalam rangka mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi (Mufidayati, 2017: 2).

Pemberian wewenang yang lebih luas kepada sekolah diharapkan bisa mendorong lebih cepat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang sisdiknas pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung pasal ini menjadi landasan penting dalam proses peningkatan mutu pendidikan nasional melalui otonomi pendidikan di tingkat sekolah sebagai satuan pendidikan yang secara langsung mengelola pendidikan bagi peserta didik (Mufidayati, 2017: 2).

Pemberian otonomi penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif. Dalam kerangka inilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menjadi salah satu kebijakan manajemen pendidikan yang ditawarkan pada paradigma baru.

Secara Konseptual, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai sebuah model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah fleksibilitas kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan mutu pendidikan mencakup tiga hal besar, yang pertama yaitu mutu pendidikan dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kualitas penduduk dan tenaga kependidikan diharapkan bisa memenuhi standar kualifikasi sesuai ketentuan perilaku relevansi dan kompetensi. Kedua mutu sarana prasarana pendidikan di sekolah baik kelayakan gedung lingkungan kondusif kelengkapan ruang-ruang maupun sarana serta media belajar di kelas. Ketiga proses pembelajaran yang baik dalam hal kurikulum maupun metode pembelajaran di kelas (Mufidayati, 2017: 46).

MBS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Peningkatan pemerataan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini dimungkinkan karena pada sebagian masyarakat tumbuh rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sekolah (Mulyasa, 2012: 25).

MBS memberikan kebebasan dan kekuasaan yang besar pada sekolah disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi MBS sesuai dengan kondisi setempat sekolah, dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Keleluasaan dalam MBS diartikan juga keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah. Dengan diberikannya kesempatan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum, guru didorong untuk berinovasi dengan melakukan eksperimentasi eksperimentasi di lingkungan sekolahnya. Dengan demikian MBS mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah/ Melalui penyusunan kurikulum efektif rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah. Prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua misalnya orang tua dapat mengawasi langsung proses belajar anaknya (Mulyasa, 2012: 26).

MBS menekankan keterlibatan maksimal berbagai pihak sehingga menjamin partisipasi staf orang tua peserta didik dan masyarakat yang lebih luas dalam perumusan-perumusan keputusan tentang pendidikan. Kesempatan berpartisipasi tersebut dapat meningkatkan komitmen mereka

terhadap sekolah. Selanjutnya aspek-aspek tersebut pada akhirnya akan mendukung efektivitas dalam pencapaian tujuan sekolah. Adanya kontrol dari masyarakat dan monitoring dari para pemerintah pengelolaan sekolah menjadi akuntabel, transparan, egaliter, dan demokratis serta menghapuskan monopoli dalam pengelolaan pendidikan. (Mulyasa, 2012: 26). Adapun pelaksanaan MBS di satuan pendidikan berdasarkan pada empat prinsip yaitu prinsip otonomi, fleksibilitas, partisipasi, dan inisiatif (Mufidayati, 2017: 54).

UPTD SPNF SKB Kota Salatiga merupakan salah satu penyelenggara pendidikan nonformal di Salatiga. Dalam menyelenggarakan pendidikan, UPTD SPNF SKB Kota Salatiga telah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan. Adapun implementasi MBS terlihat pada ruang lingkup kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, hubungan sekolah dan masyarakat, dan budaya serta lingkungan.

Dalam melaksanakan MBS di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga juga telah menerapkan empat prinsip. Prinsip kemandirian yang diterapkan terlihat pada setiap program kegiatan. Contoh diantaranya adalah pada Program Pendidikan dan Pelatihan. Dalam menentukan jenis keterampilan yang akan dilaksanakan dalam pelatihan, satuan pendidikan tidak bergantung pada pusat. Satuan pendidikan menentukan jenis keterampilan pada program tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat.

Penerapan prinsip fleksibilitas MBS di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga diterapkan dalam penyusunan RKAS. Pada penyusunan RKAS Program kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pada program kegiatan. Prinsip fleksibilitas ini juga terlihat dalam pembelajaran di Program Kesetaraan. Sekolah menentukan pembelajaran keterampilan berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan, baik sumber daya manusia dan juga sarana prasarana.

Prinsip partisipasi di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga terlihat pada Program SSB dan PAUD. Pada kedua program tersebut, masyarakat dilibatkan dalam wadah komite sekolah. Pada Program PAUD, komite sekolah berperan aktif ikut memberikan saran dan masukan dalam penentuan kegiatan program satuan pendidikan yang akan dilakukan selama satu tahun. Di akhir program komite memberikan saran dan masukan kegiatan yang sudah dilakukan sehingga bisa dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Prinsip inisiatif terlihat pada pegawainya. Untuk mengembangkan potensi pendidik dalam menjalankan tugasnya sebagai pamong belajar, pamong belajar memiliki inisiatif mengikuti kegiatan-kegiatan seperti seminar dan pelatihan-pelatihan. Selain itu, pamong belajar juga melakukan uji kompetensi pada bidang keterampilan.

Secara Konseptual, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai sebuah model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/ keluwesan-keluwesannya kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku (Depdiknas dalam Machali dan Hidayat, 2018:58).

Senada dengan pendapat di atas, secara konseptual, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai sebuah model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah fleksibilitas kepada sekolah dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mufidayati, 2017: 46).

Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) atau Manajemen Berbasis Madrasah (Madrasah Based Management) adalah sebuah strategi untuk mewujudkan sekolah/madrasah yang efektif, efisien, dan produktif. MBS/MBM merupakan paradigma baru dalam manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah/madrasah, dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional (Machali & Hidayat, 2016:57).

Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah model manajemen sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara

langsung semua warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua peserta didik, pengusaha, dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kemdikbud (2013: 18) manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dicapai melalui dua unsur, yaitu proses dan komponen manajemen sekolah yang efektif. Ditinjau dari proses, aktivitas MBS terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari sudut pandang komponennya, MBS terdiri atas manajemen: kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, hubungan sekolah dan masyarakat, dan budaya dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang mempunyai karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif studi kasus yang menggambarkan subyek penelitian dengan mencermati secara mendalam. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif yang dituangkan dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan implementasi fungsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga. Penelitian ini dilakukan di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga yang beralamat di Soekarno Hatta RT 1 RW 3 Cebongan Argomulyo Salatiga. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja karena UPTD SPNF SKB Kota Salatiga telah mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah pada ruang lingkup kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan budaya dan lingkungan sekolah. Waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan terhitung bulan Desember 2023.

Sumber data primer langsung memberikan data secara langsung kepada pengumpul data atau peneliti. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah kepala sekolah, tim pengembang kurikulum, petugas inventaris, dan bendahara. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada peneliti. Data dapat diberikan melalui dokumen. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan kondisi lembaga sebagai lokasi penelitian dan dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Otonomi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga.

1. Otonomi

Prinsip kemandirian yang diterapkan di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga terlihat pada setiap program kegiatan. Contoh diantaranya adalah pada Program Pendidikan dan Pelatihan. Dalam menentukan jenis keterampilan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut, satuan pendidikan secara mandiri menentukan jenis keterampilan pada program tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Penyelenggaraan kegiatan pun tidak selalu bergantung pada pendanaan yang berasal dari APBN dan APBD. Meski penyelenggaraan tidak mendapatkan dukungan dana baik dari APBN maupun APBD, program ini tetap berjalan. Satuan pendidikan secara mandiri menyelenggarakan kegiatan program tersebut dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia dan memberdayakan tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan.

Prinsip otonomi juga terlihat pada Program PAUD. Setiap tahun Program PAUD mendapatkan anggaran BOP. Anggaran tersebut digunakan untuk menopang pembiayaan operasional pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Di dalam realita, anggaran BOP yang diterima tersebut, tidak dapat mencukupi untuk menopang pembiayaan operasional pembelajaran dalam 1 tahun ajaran. Menyikapi hal tersebut, maka secara mandiri satuan pendidikan melalui kelompok Paguyuban Orang Tua PAUD UPTD SPNF SKB Kota Salatiga, menentukan bersama-sama kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan dan juga menghitung bersama rincian anggaran biaya yang dibutuhkan untuk ditanggung orang tua peserta didik. Pembiayaan ini berasal dari orang tua peserta didik dan dikembalikan lagi untuk kegiatan peserta didik. Meski dana BOP tidak dapat menopang

pembiayaan operasional pembelajaran dalam 1 tahun ajaran, dengan adanya kemandirian orang tua yang ikut serta menopang kekurangan biaya, kegiatan dapat berjalan.

Tabel 3 Daftar Jenis Keterampilan pada Program Pendidikan dan Keterampilan

No	Daftar Program Pendidikan dan Keterampilan	Narasumber	Sumber Dana	Keterangan
1.	PKH Menjahit Kebaya	Rumiyati	APBD	Nara sumber kerja sama dengan Kartika Collection
2.	PKH Multimedia Interaktif	Oskil Riyanto, S. Kom.	APBD	Nara sumber dari UPTD SPNF SKB Kota Salatiga
3.	PKH Technical Marketing	Andika Renda P. S.E.	APBD	Nara sumber kerja sama dengan Kaizen Group
4.	Keterampilan Multimedia Interaktif	Oskil R., S. Kom.	-	Nara sumber dari UPTD SPNF SKB Kota Salatiga
5.	Keterampilan Aplikasi Perkantoran	Riska N. S, Pd.	-	Nara sumber dari UPTD SPNF SKB Kota Salatiga
7.	<i>Computer Kids</i>	Sigid Setya W. S, Pd.	-	Nara sumber dari UPTD SPNF SKB Kota Salatiga

Senada dengan Program PAUD, prinsip otonomi juga terlihat pada Program Sekolah Sepak Bola di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga. Berjalanya Program SSB tidak tergantung dukungan dana yang diberikan oleh APBD. Seperti tahun 2023, Program SSB tidak mendapatkan anggaran dari APBD, tetapi program ini tetap berjalan dengan baik. Orang tua yang tergabung dalam paguyuban SSB secara mandiri menopang kebutuhan anggaran dalam Program SSB tersebut.

2. Fleksibilitas

Penerapan prinsip fleksibilitas di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga diterapkan dalam penyusunan RKAS Program yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Penyusunan RKAS disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pada program kegiatan. RKAS ini juga dapat diubah pada saat anggaran perubahan melalui SIPD dan disesuaikan dengan juknis yang hadir di awal tahun.

Prinsip fleksibilitas pada MBS juga terlihat dalam penyusunan kurikulum di satuan pendidikan. Fleksibilitas pada kurikulum terletak pada penyusunan pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisaian pembelajaran pada Program Pendidikan Kesetaraan, harus diawali dengan melakukan pengorganisasian satuan kredit kompetensi. Satuan kredit kompetensi merupakan beban belajar pada Program Pendidikan Kesetaraan yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Beban belajar satu satuan kredit kompetensi tersebut dapat dapat dicapai melalui pembelajaran satu jam untuk tatap muka, dua jam tutorial dan tiga jam mandiri mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. Dalam menentukan satuan kredit kompetensi masing-masing mata pelajaran, bersifat fleksibel. Hal ini didasarkan pada beberapa hal yaitu kompleksitas capaian pembelajaran pada tiap mata pelajaran, sarana dan prasarana yang tersedia di satuan pendidikan tersebut. Yang tidak kalah penting adalah dalam menentukan beban satuan kredit kompetensi adalah rekomendasi dari hasil analisis konteks yang akan dikembangkan menjadi program-program unggulan.

Begitu juga dalam menentukan pendekatan pembelajaran. Satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menentukan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan karakteristik peserta didik, sarana parasarana dan jumlah tenaga pendidik serta tenaga kependidikan, maka pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran adalah pendekatan mata pembelajaran dan pendekatan blok waku (untuk metapa pelajaran pemberdayaan dan keterampilan).

Prinsip flesibilitas juga terlihat pada pembelajaran di Program Kesetaraan. Sekolah menentukan pembelajaran keterampilan berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan, baik sumber daya manusia dan juga sarana prasarana. Mengingat lahan yang dimiliki sekolah begitu luas dan memiliki karakteristik subur, maka pada tahun ajaran 2021/2022 lahan tersebut dimanfaatkan untuk pembelajaran keterampilan budidaya singkong. Terlihat pada gambar 1.



Gambar 1 Keterampilan Budidaya Singkong

Pada tahun ajaran 2022/2023 pembelajaran keterampilan berubah menjadi keterampilan perikanan terlihat pada gambar 2. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Lahan yang semula subur untuk pembelajaran keterampilan menanam singkong, sekarang sudah tidak subur karena tanahnya diambil untuk pembangunan lapangan sepak bola. Selain keterampilan perikanan, pada Program Kesetaraan juga terdapat keterampilan lain, yaitu aplikasi perkantoran dan multi media interaktif terlihat pada gambar 3. Kedua keterampilan ini diberikan karena sekolah memiliki tenaga pendidik yang kompeten di bidang IT dan juga memiliki sarana prasarana yang menunjang.



Gambar 2 Keterampilan Perikanan



Gambar 3 Keterampilan Multimedia Interaktif

3. Partisipasi

Prinsip partisipasi di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga terlihat pada Program SSB dan PAUD. Pada kedua program tersebut, masyarakat dilibatkan dalam wadah komite sekolah terlihat pada gambar 4. Pada Program PAUD, komite sekolah berperan aktif ikut memberikan saran dan masukan dalam penentuan kegiatan program satuan pendidikan yang akan dilakukan selama satu tahun.



Gambar 4 Pelibatan Komite pada Perencanaan Penyusunan Program SSB

Di akhir program komite memberikan saran dan masukan kegiatan yang sudah dilakukan sehingga bisa dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Misalnya pada kegiatan pentas seni, wisuda atau kegiatan peringatan hari Kartini. Orang tua peserta didik dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah, ikut andil mempersiapkan kegiatan tersebut dan juga ikut serta sebagai pengisi acara. Pada kegiatan pembelajaran, orang tua juga dilibatkan untuk menjadi narasumber terutama pada tema profesi.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga terlihat pada Program SSB. Orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar terlibat ikut andil dalam menjaga dan merawat lapangan melalui kegiatan kerja bakti dan penggantian sarana yang telah rusak. Senada dengan Program PAUD dan SSB, pada Program Pendidikan Kesetaraan prinsip partisipasi juga terlihat pada kegiatan MPLS. Satuan pendidikan melibatkan Polsek Argomulyo dan Puskesmas Cebongan untuk menjadi narasumber memberikan materi tentang ketertiban lalu lintas dan kesehatan reproduksi serta kenalan remaja.

4. Inisiatif

Untuk mengembangkan potensi pendidik dalam menjalankan tugasnya sebagai pamong belajar, pamong belajar memiliki inisiatif mengikuti kegiatan-kegiatan seperti seminar dan pelatihan-pelatihan. Selain itu, pamong belajar juga melakukan uji kompetensi pada bidang keterampilan. Hal ini ditujukan agar dapat dijadikan bekal untuk mengembangkan karirnya di dunia pendidikan nonformal dan juga dapat digunakan untuk bekal mengajar di bidang keterampilan terlihat pada gambar 5. Selain itu, prinsip inisiatif ini juga terlihat pada penerapan kurikulum merdeka. Pendidik memiliki inisiatif untuk mencari informasi atau ilmu berkaitan dengan kurikulum merdeka melalui pelatihan-pelatihan mandiri.



Gambar 5 Pamong Belajar Mengikuti Pelatihan

Implementasi Fungsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Implementasi fungsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi.

1. Manajemen kurikulum berbasis sekolah.

Adapun yang dilaksanakan di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga dalam manajemen kurikulum adalah diawali dengan penentuan jenis kurikulum yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pada tahun ajaran 2023/ 2024, kurikulum yang digunakan di Program Pendidikan Kesetaraan di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga adalah menggunakan Kurikulum Merdeka pilihan merdeka berubah. Kegiatan manajemen kurikulum dilanjutkan dengan pembentukan tim pengembang kurikulum yang terdiri dari pendidik. Tim pengembang kurikulum melakukan analisis konteks untuk membuat KOSP. Analisis konteks lingkungan satuan pendidikan dilakukan dengan menggunakan pendekatan pentagonal aset dan analisis SWOT. Berdasarkan analisis konteks tersebut, maka disusun pemetaan SKK per mata pelajaran dan konversi ke jam pembelajaran. Hasil dari konversi SKK ke jam pembelajaran dituangkan dalam bentuk jadwal pembelajaran. Analisis konteks ini juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun mata pelajaran pemberdayaan dan mata pelajaran keterampilan. Penentuan jenis pemberdayaan dan keterampilan berdasarkan potensi dan peluang yang dimiliki di wilayah lingkungan satuan pendidikan.

Dalam manajemen kurikulum ini, UPTD SPNF SKB Kota Salatiga juga merencanakan kegiatan pada masing-masing program yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun ajaran dan dituangkan dalam kalender pendidikan. Pada KOSP juga direncanakan jenis dan bentuk evaluasi yang akan diterapkan dalam pembelajaran serta bentuk peningkatan kompetensi yang akan dilakukan.

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan pembagian jam mengajar pendidik sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh waka kurikulum. Setelah itu, pendidik juga melakukan pengorganisasian capaian pembelajaran per fase. Kurikulum operasional satuan pendidikan yang telah disusun, dilaksanakan pada pembelajaran.

Adapun kurikulum yang digunakan di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga adalah sebagai berikut. a) Program PAUD: kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka; b) Program Kesetaraan: kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka; c) Program Pendidikan dan Pelatihan: SKKNI; dan d) Program SSB: Filanesia. Pada manajemen kurikulum ini, kurikulum juga dievaluasi setiap tahun

sebelum tahun ajaran baru. Hal ini ditujukan untuk menilai apakah kurikulum masih relevan atau tidak. Apabila kurikulum sudah tidak relevan lagi, maka akan dilakukan perbaikan.



Gambar 6 Rapat Evaluasi Kurikulum

2. Manajemen peserta didik berbasis sekolah.

a) Analisis kebutuhan peserta didik dan rekrutmen peserta didik.

Dalam menetapkan jumlah peserta didik yang dibutuhkan oleh UPTD SPNF SKB Kota Salatiga, disesuaikan dengan jumlah kelas dan fasilitas yang terdapat di satuan pendidikan. Contohnya pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Multimedia Interaktif. Sarana dan prasarana yang tersedia di dalam lab. komputer berjumlah 25, sehingga penerimaan peserta didik untuk keterampilan multimedia interaktif dalam 1 rombongan belajar ditetapkan sejumlah 25 peserta.

b) Rekrutmen dan seleksi peserta didik.

Dalam hal rekrutmen dan seleksi peserta didik, masing-masing program menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Penentuan persyaratan ini mengacu juknis yang berlaku. Apabila program kegiatan ditopang oleh dana APBN, maka persyaratan peserta didik menyesuaikan dengan juknis yang berlaku. Contohnya adalah Program Kecakapan Wirausaha. Dalam program tersebut, peserta yang mendaftar harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu berusia 15 tahun s.d. 25 tahun, belum memiliki pekerjaan atau menganggur, diutamakan keluarga tidak mampu atau pernah menerima KIP. Peserta yang mendaftar dan memenuhi persyaratan tersebut, maka akan diterima dan dapat mengikuti kegiatan yang dimaksud. Sedangkan untuk program yang tidak ditopang oleh dana seperti Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Aplikasi Perkantoran, peserta akan diterima jika telah memenuhi persyaratan secara administratif saja, seperti melengkapi berkas KK, KTP, fotok 3x4, dan ijazah terakhir.

c) Orientasi peserta didik.

Pada pertemuan awal tahun ajaran baru, UPTD SPNF SKB Kota Salatiga selalu mengadakan kegiatan orientasi peserta didik gambar 7. Kegiatan tersebut dilakukan pada Program Kesetaraan dan Program PAUD. Pada Program Kesetaraan tahun ajaran 2023/2024 dikemas dengan kegiatan pengenalan lingkungan selama 3 hari setiap awal tahun ajaran baru. Selain dikenalkan dengan lingkungan sekolah dan peserta didik pada kegiatan tersebut juga diberikan materi-metari umum seperti kesehatan dan reproduksi, narkoba dan kenakalan remaja, dan etika kedisiplinan. Senada dengan Program Kesetaraan, orientasi peserta didik juga dilakukan pada Program PAUD. Pada tahun ajaran 2023/2024, orientasi peserta didik dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru selama satu minggu. Adapun kegiatannya dimulai dengan aktivitas melihat drama dari guru berjudul “Gajah dan Semut” di hari pertama gambar 8.



Gambar 7 Orientasi Pendidikan Kesetaraan



Gambar 8 Orientasi Pendidikan Anak Usia Dini

Disusul hari kedua yaitu pengenalan lingkungan sekolah dengan berkeliling di lingkungan satuan pendidikan. Dilanjutkan hari ketiga yaitu senam bersama antara peserta didik dan pendidik. Hari keempat membuat karya seni dan kegiatan ditutup dihari kelima dengan bermain bersama menggunakan alat tradisional.

d) Penempatan peserta didik.

Dalam hal penempatan peserta didik, pada Program PAUD dilakukan berdasarkan kelompok usia, yaitu kelompok usia 2-3, 3-4, 4-5, 5-6. Berbeda dengan Program PAUD, pengelompokan peserta didik pada Program Kesetaraan dilakukan berdasarkan kelas, yaitu kelas 4, 5, dan 6 untuk Paket A. Kelas 7, 8, dan 9 untuk Paket B dan kelas 10, 11, dan 12 untuk Paket C. Pengelompokan peserta didik pada Program Pendidikan dan Pelatihan dilakukan berdasarkan jenis keterampilan yang diikuti oleh peserta didik. Senada dengan Program PAUD, pengelompokan Program SSB dilakukan berdasarkan kelompok usia, yaitu kelompok usia 6-9 dan kelompok usia 10-13.

e) Pembinaan dan pengembangan peserta didik.

Pembinaan dan pengembangan peserta didik dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan juga kegiatan lain gambar 9 yang dapat menumbuhkembangkan bakat atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Contohnya di program PAUD, diberikan kegiatan ekstrakurikuler drum band dan menari.



Gambar 9 Ekstrakurikuler Pendidikan Anak Usia Dini

Sedangkan di Program Kesetaraan mengirimkan peserta didik pada kegiatan lomba-lomba. Pada tanggal 20 November 2022 Program Kesetaraan mengirimkan peserta didik untuk mengikuti lomba *got talent* menyanyi yang diadakan oleh Kota Salatiga dalam rangka memperingati hari KORPRI. Dan hasilnya mendapatkan juara 2 tingkat SMA dan umum.



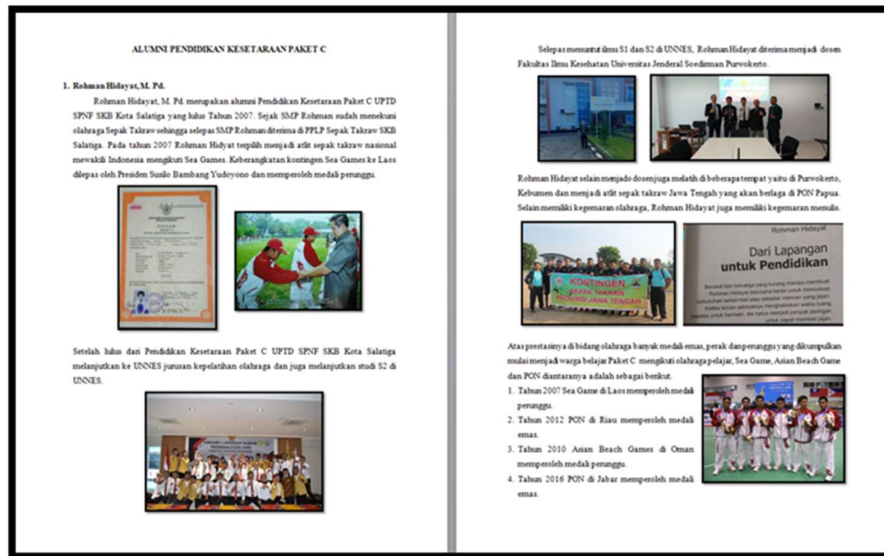
Gambar 10 Pengembangan Keterampilan Peserta Didik melalui Lomba

Dalam pembinaan karakter, pada Program Kesetaraan disampaikan dalam bentuk pembelajaran P5 yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada mata pelajaran pemberdayaan dan keterampilan. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang dikuatkan adalah gotong royong dan kreatif.

f) Pencatatan dan pelaporan peserta didik.

Pencatatan data peserta didik di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga dilakukan oleh masing-masing wali kelas. Wali kelas dari masing-masing program memberikan rekapan data kepada admin dapodik untuk diinput di dapodik. Adapun pelaporan hasil belajar peserta didik dilakukan setiap semester dan disampaikan kepada orang tua peserta didik. Pencatatan alumni juga dilakukan untuk

mengetahui *sukses story* alumni. Dari hasil pencatatan *sukses story* ini, alhasil UPTD SPNF SKB Kota Salatiga dapat mengikuti lomba alumni terbaik tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat PMPK dan mendapatkan juara harapan III.



Gambar 11 Sukses Story Peserta Didik Kesetaraan

3. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan berbasis sekolah. Perencanaan kebutuhan pegawai di UPTD SPNF SKB Kota Salatiga dibuat berdasarkan analisis beban kerja. Dari analisis beban kerja tersebut tabel 10, dapat diketahui jumlah pegawai yang seharusnya ada di satuan pendidikan. Setelah diketahui jumlah yang dibutuhkan, kemudian dituangkan dalam data bazzeting. Data bazzeting tersebut menggambarkan kondisi riil pegawai yang tersedia di satuan pendidikan, pegawai yang memasuki masa pensiun 5 tahun mendatang, kekurangan pegawai, dan kelebihan pegawai, serta usulan formasi pegawai yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan. Setelah melakukan perencanaan pengadaan pegawai melalui data bazzeting, kemudian disampaikan ke bagian keuangan untuk diusulkan pengadaan pegawai melalui formasi CPNS.

Tabel 10 Jumlah Kebutuhan Pamong Belajar Berdasarkan Analisis Beban Kerja

No.	Pegawai	Jumlah
1	Pamong Belajar Pertama	15
2	Pamong Belajar Muda	10
3	Pamong Belajar Madya	8
	Jumlah	33

Tabel 11 Data Bazzeting Pegawai

No.	Jumlah Pegawai	Akan Pensiun	Kekurangan
1.	Pamong belajar pertama: 4	Tahun 2023: 0	Tahun 2023
2.	Pamong belajar muda: 3	Tahun 2024: 2	Pamong belajar pertama: 11
3.	Pamong belajar madya: 5	(pamong belajar muda 1 dan pamong belajar madya 1)	Pamong belajar muda: 7
		Tahun 2025: 0	Pamong belajar madya: 3
		Tahun 2026: 0	Tahun 2024
		Tahun 2027: 0	Pamong belajar pertama: 11
			Pamong belajar muda: 8
			Pamong belajar madya: 4
			Tahun 2025

Pamong belajar pertama: 11
 Pamong belajar muda: 8
 Pamong belajar madya: 4
 Tahun 2026
 Pamong belajar pertama: 11
 Pamong belajar muda: 8
 Pamong belajar madya: 4
 Tahun 2027
 Pamong belajar pertama: 11
 Pamong belajar muda: 8
 Pamong belajar madya: 4

Dari segi pembagian tugas, kepala satuan pendidikan memberdayakan semua pegawai yang terdapat pada sekolah. Masing-masing pegawai diberikan tugas dan tanggung jawab berbeda-beda sesuai dengan potensi. Saat ini UPTD SPNF SKB Kota Salatiga menjalankan 4 program, yaitu Program PAUD, Program Kesetaraan, Program Pendidikan dan Pelatihan, dan Program TBM. Masing-masing program dikelola oleh ketua, bendahara, sekertaris, dan anggota. Dalam penentuan peran pengelola masing-masing program, kepala sekolah mempertimbangkan potensi, pengalaman, dan kecakapan pegawai dalam menangani program tersebut. Contoh lain adalah saat ini UPTD SPNF SKB Kota Salatiga tidak memiliki pegawai yang menempati tata usaha, sehingga tidak ada tenaga yang dapat mengakomodir menyelesaikan tugas ketatatusahaan seperti persuratan, bendahara, dan inventaris barang. Menyikapi kondisi tersebut, kepala sekolah memberikan tugas tambahan kepada pamong belajar sebagai pengurus persuratan, bendahara, dan inventaris barang. Pemberian tugas tambahan ini berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai.

Tabel 12 Daftar Pengelola Program

No.	Program	Pengelola
1.	PAUD	Ketua: Drs. Supandi, M. Pd. Bendahara: Lestariningsih, S. Pd. Sekertaris: Dian Triviana Intan P. S. Pd.
2.	Kesetaraan	Ketua: Tio Napitupulu, S. pd. Bendahara: Muflikah, S. Pd. Sekertaris: Dra. Agata Sri Cahyani dan Tio Napitupulu, S. Pd. Waka Kurikulum: Ina Siah, S. Pd.
3.	SSB	Ketua: Nurhadi, Amd. Bendahara: Riyanik dan Dra. Agata Sri Cahyani Sekertaris: Ina Siah, S. Pd.
4.	Pendidikan dan Pelatihan	Ketua: Ina Siah, S. Pd. Bendahara: Anisa Prabawani, S. Pd. Sekertaria: Riska Novitasari, S. Pd.
5.	TBM	Ketua: Dian Triviana Intan P. S. Pd. Bendahara: Dyah Uswatun, S. Pd. Sekertaris: Fitriingsih Hidayati, S. Pd.

Dalam pembagian tugas, kepala sekolah memberikan penekanan bahwa tugas yang sudah diberikan harus dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dari segi pegawai menjalankan tugas, pegawai diinstruksi menjalankan tugas sesuai dengan pembagian kerja. Kepala sekolah memberikan arahan, motivasi dan juga memantau terhadap hasil akhir pekerjaan. Kepala satuan pendidikan membangun komunikasi dua arah yang berlandaskan kepercayaan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, kepala sekolah memfasilitasi dengan memberikan pelatihan, *in house training*, mengirim pegawai dalam kegiatan sosialisasi, workshop, atau bimbingan teknis dan studi tiru. Salah satu contoh diantaranya ketika ada kebijakan pemerintah tentang kurikulum merdeka yang harus diterapkan pada pendidikan kesetaraan. Agar pamong belajar

menguasai tentang kurikulum merdeka, kepala sekolah memfasilitasi pamong belajar dengan mengadakan *in house training* dengan membahas materi kurikulum merdeka.



Gambar 12 Peningkatan Kompetensi: *In House Training*

Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi pamong belajar, kepala sekolah mendorong dan mewajibkan pamong untuk mengikuti uji kompetensi di bidang keterampilan. Dalam hal peningkatan prestasi, kepala sekolah juga memberikan dukungan. Salah satu diantaranya dengan memberikan dukungan pegawai untuk mengikuti lomba-lomba.

Dalam hal pembinaan tenaga pendidik dilakukan melalui rapat bulanan yang diadakan setiap awal bulan terlihat pada gambar 13. Dalam rapat bulanan tersebut selain menyampaikan informasi-informasi kelembagaan, juga digunakan untuk membina kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas. Selain itu pembinaan juga dilakukan melalui supervisi pembelajaran. Contohnya dalam Program Kesetaraan. Supervisi dilakukan sesuai jadwal yang telah dibuat oleh kepala satuan pendidikan. Di akhir tahun, untuk mengevaluasi kinerja dari pegawainya, kepala satuan melakukan penilaian masing-masing pegawai yang dituangkan ke dalam SKP.



Gambar 13 Rapat Bulanan

4. Manajemen sarana dan prasarana berbasis sekolah.

Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana UPTD SPNF SKB Kota Salatiga dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan skala prioritas. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana dituangkan ke dalam bentuk rencana kerja yang dibuat untuk lima tahun ke depan. Dari rencana kerja

tersebut dirinci ke dalam RAB dan diajukan ke Dinas Pendidikan Kota Salatiga serta diinput ke dalam aplikasi SIPD.

Contoh pada tahun 2022 ini seiring dengan berakhirnya masa jabatan wali Kota Salatiga, UPTD SPNF SKB Kota Salatiga menyusun renja untuk 5 tahun mendatang dan diajukan ke Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Pada renja yang diajukan tersebut, skala prioritas yang direncanakan pada Program Pendidikan dan Pelatihan adalah pembangunan ruang keterampilan. Hal ini dilakukan karena saat ini satuan pendidikan belum memiliki ruang keterampilan untuk kegiatan pembelajaran keterampilan.

Pencatatan inventarisasi juga merupakan bagian dari manajemen sarana dan prasarana. Setelah pengajuan sarana prasarana disetujui dan direalisasikan, maka petugas inventaris memiliki tanggung jawab untuk mencatat ke dalam buku masuk inventaris. Begitu juga dalam keseharian, apabila ada pegawai yang menggunakan barang tersebut, maka akan dicatat dalam buku keluar barang inventaris. Pencatatan inventaris ke dalam buku masuk dan keluar ini akan dijadikan dasar untuk membuat laporan setiap bulan dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Pencatatan inventaris tidak hanya dilakukan pada buku masuk dan buku keluar saja, tetapi petugas inventaris juga membuat catatan kendali ruangan yang ditempel di masing-masing ruangan.

Pengecekan rutin sarana dan prasarana pun dilakukan secara rutin, yaitu setahun dua kali. Pengecekan sarana dan prasarana ini dilakukan untuk memastikan apakah sarana yang ada satuan pendidikan masih dalam kondisi baik atau membutuhkan perbaikan. Apabila dalam pengecekan kondisi sarana dan prasarana ditemukan kondisi yang kurang baik, maka akan dilaporkan dan diajukan untuk perbaikan ke Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Apabila setelah pengecekan menemukan barang yang memiliki kerusakan berat dan sudah tidak dapat diperbaiki, maka akan diajukan untuk penghapusan. Hasil dari pengecekan keseluruhan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah dilaporkan secara rutin ke Dinas Pendidikan Kota Salatiga dua kali dalam setahun. Pengajuan penghapusan pun juga sama. Dilakukan dua kali dalam setahun.

5. Manajemen pembiayaan berbasis sekolah.

Sumber pendanaan di sekolah berasal dari APBN, APBD, dan swadaya. Perencanaan keuangan di sekolah saat ini yang dibuat adalah perencanaan jangka pendek dan jangka menengah. Perencanaan yang disusun disesuaikan dengan kebutuhan. Perencanaan jangka pendek digunakan untuk satu tahun dan perencanaan jangka menengah digunakan untuk lima tahun. Masing-masing program membuat perencanaan yang dituangkan dalam bentuk renja dan dirinci dalam bentuk RKA serta diinput diaplikasi SIPD. Apabila terdapat pembiayaan yang tidak dicukupi oleh dana APBN dan APBD maka satuan pendidikan berkoordinasi dengan orang tua peserta didik untuk turut serta berperan dalam menopang pembiayaan. Selain menggali dana melalui APBN, APBD, satuan pendidikan juga menggali pembiayaan dari kegiatan kantin sekolah. Satuan pendidikan memiliki kantin mini yang setiap hari menyediakan aneka jajanan dan kebutuhan untuk peserta didik dan pendidik serta tenaga pendidik.

Alokasi pembelanjaan atau penggunaan, dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah disusun. Masing-masing bendahara program membuat pembukuan keuangan dan laporan pertanggungjawaban belanja. Setiap bulan bendahara memiliki tugas untuk melaporkan hasil pembukuan ke kepala satuan pendidikan.

6. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat berbasis sekolah.

Salah satu hubungan sekolah dengan masyarakat diwujudkan dalam bentuk komite. Ini terlihat pada Program PAUD dan juga SSB. Sekolah dan komite di awal tahun anggaran dilibatkan dalam menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Selain dilibatkan dalam penyusunan program kegiatan, komite juga dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran yaitu menjadi nara sumber pada kegiatan kelas inspirasi. Selain pada kegiatan pembelajaran, komite juga dilibatkan dalam kegiatan di luar pembelajaran, seperti kegiatan peringatan hari Kartini dan pentas seni pada gambar 14.

Selain pelibatan dalam kegiatan-kegiatan tersebut, komite juga dilibatkan dalam evaluasi kegiatan. Senada dengan program PAUD, pada Program SSB, komite juga dilibatkan mulai

penyusunan sampai dengan evaluasi program. Komite juga ikut berperan aktif dalam menangani kegiatan seperti *try in dan try out* setiap tahun.



Gambar 14 Pelibatan Komite pada Pentas Seni

Hubungan sekolah dan masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk komite, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk kerja sama. Saat ini satuan pendidikan memiliki fasilitas berupa lapangan sepak bola mini berumput sintesis. Lapangan ini merupakan lapangan sepak bola mini berumput sintesis pertama di Salatiga, sehingga banyak masyarakat yang meminjam dan memanfaatkan fasilitas tersebut. Dalam perawatannya, masyarakat juga ikut andil. Masyarakat berinisiatif melakukan kerja bakti di area lapangan sepak bola agar senantiasa terjaga kebersihannya. Masyarakat juga ikut memperbaiki apabila terdapat fasilitas yang mengalami kerusakan.

Satuan pendidikan juga menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. Diantaranya adalah kader posyandu. Kader posyandu berperan sebagai sumber informasi yang menyajikan data anak warga sekitar yang sudah waktunya masuk PAUD. Hubungan kerja sama juga dibangun dengan dunia usaha wilayah sekitar. Salah satu diantaranya adalah Argotelo. Bentuk kerja sama yang dilakukan antara satuan pendidikan ini diwujudkan dalam rangka mendukung pembelajaran keterampilan budi daya singkong pada Program Pendidikan Kesetaraan gambar 15.



Gambar 15 Kerja Sama UPTD SPNF SKB Salatiiga dengan Instansi Lain

Selain itu, sekolah juga menjalin hubungan kerja sama dengan SCI. Pada saat ini beberapa peserta didik Program Pendidikan Kesetaraan Paket C bekerja di SCI. Agar pekerjaan berjalan dan sekolah juga berjalan, maka sekolah mengajak kerja sama SCI agar memberikan motivasi kepada

peserta didik untuk menempuh pendidikan KPC sampai selesai. Dan sekolah juga mengajak kerja sama agar peserta didik diberikan kelonggaran atau ijin ketika mengikuti penilaian di sekolah.

7. Manajemen budaya dan lingkungan berbasis sekolah.

Budaya yang diterapkan dalam memberikan pelayanan ke masyarakat pada gambar 16 adalah budaya pelayanan prima. UPTD SPNF SKB Kota Salatiga melayani berbagai program kegiatan. Dalam pelayanan tersebut, pegawai tidak hanya bertumpu pada tanggung jawab, tetapi juga memperhatikan *attitude, attention, action, ability, apperance, affirmation, dan sympathy*. Budaya religius juga dibangun di sekolah. Sekolah mengadakan kajian islami setiap hari Kamis yang diikuti oleh pegawai di sekolah. Selain itu, sekolah juga membangun budaya infaq setiap hari. Infaq ini akan dibuka pada awal bulan dan diberikan kepada peserta didik Program PAUD dan Program Kesetaraan yang kurang atau tidak mampu. Budaya disiplin juga diterapkan di satuan pendidikan. Disiplin tidak hanya berkaitan waktu, tetapi juga dalam hal melaksanakan pekerjaan, dan dalam hal mengikuti kegiatan. Kepala sekolah memberikan contoh dalam hal disiplin waktu. Kepala sekolah selalu datang lebih awal dari pegawainya. Budaya demokrasi juga tercermin di sekolah. Dalam pengambilan keputusan bersifat kolegial. Kepala sekolah melibatkan warga sekolah dalam mengambil keputusan.



Gambar 16 Pelayanan kepada Masyarakat

PENUTUP

Simpulan

1. UPTD SPNF SKB Kota Salatiga telah mengimplementasikan prinsip manajemen berbasis sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal.
2. UPTD SPNF SKB Kota Salatiga mengimplementasi fungsi manajemen berbasis sekolah pada manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, dan manajemen budaya dan lingkungan.

Saran

1. Kepala UPTD SPNF SKB Kota Salatiga perlu meningkatkan perannya sebagai *supervisor*. Perencanaan yang telah disusun untuk melakukan supervisi, sebaiknya dilaksanakan secara maksimal ditengah kesibukan dan padatnya kegiatan yang berjalan.
2. Dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai inovator, kepala UPTD SPNF SKB Kota Salatiga perlu menggali ide-ide kreatif untuk memajemen satuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaka, Reza Febry. 2018. *Manajemen Berbasis Sekolah*. 31 Agustus 2018. <https://repository.usd.ac.id/31116/2/111324035>. 15 Desember 2022.

- Bafadal, Ibrahim. 2013. *Panduan Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kemendikbud.
- Depdiknas.2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Panduan Penyusunan Proposal dan Pelaporan*. Jakarta: Depdiknas.
- Hoy, Wayne K. dan Cecil H Miskel. 2014. *Adminitrasi Pendidikan*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Machali, Hidayat dan Ara Hidayat. 2018. *The Hand Book of Education Management Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/ Madrasah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Miskel, Gecil G. dan Hoy, Wayne K. 2014. *Administrasi Pendidikan Teori, Rised, dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mufidayati, Kurniasih. 2017. *Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai Bentuk Otonomi Pendidikan*. Jakarta: CV Budi Utama.
- Muyono. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Malang: Ar-Ruzz Media.
- Nurkholis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah: Model, Teori, dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Prihantini, dkk. 2020. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jawa Barat: Edu Publisier.
- Sutyana, Nana dan Fadhli Rahmat. 2021. *Manajemen Berbasis Sekolah Solusis Wujudkan Sekolah Otonom dan Mandiri*. Tasikmalaya: PRCI.
- Zahra, Ayu. 2017. *Peran Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMA Negeri 5 Banda Aceh*. 21 November 2015. <https://sg.docs.wps.com/l/sIAWS4bZDrtzomwY?sa=00&st=0t>.
15 Desember 2022.